



LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT



**Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Semester I Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan rahmat dan karunianya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penanganan Pengaduan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan pada Semester I Tahun 2025. Laporan Penanganan Pengaduan ini juga salah satu upaya dalam mewujudkan kesungguhan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menjadi unit kerja yang melaksanakan reformasi birokrasi.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan turut berkomitmen untuk melakukan penanganan pengaduan masyarakat dan *whistleblower* sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mengelola masukan, saran dan pengaduan masyarakat dan *whistleblower* melalui sistem SP4N-LAPOR!.

Perlu ditegaskan bahwa Laporan Penanganan Pengaduan ini tidak dimaksudkan sebagai satu-satunya laporan yang digunakan sebagai acuan, akan tetapi salah satu upaya mewujudkan sistem penanganan pengaduan yang terintegrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami menyadari laporan ini masih terdapat kekurangan sehingga kami berharap adanya kritik dan saran untuk perbaikan laporan di masa yang akan datang. Besar harapan kami agar laporan ini dapat bermanfaat bagi setiap *stakeholder*. Kami juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan.

Jakarta, 8 Juli 2025
Ketua Tim Penanganan Pengaduan


Dedhy Setiawan Wibowo, S.Pi, M.A.P

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Saluran Pengaduan.....	2
BAB II GAMBARAN UMUM.....	4
2.1 Tim Penanganan Pengaduan	4
2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan.....	4
BAB III PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT	6
3.1 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	6
3.2 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	7
BAB IV SARAN DAN TINDAK LANJUT.....	8
4.1 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi	8
4.2 Saran dan Rekomendasi	8
V PENUTUP	9
LAMPIRAN	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar .1 Grafik Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2025

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Reformasi birokrasi yang dicanangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan baik (*good government*) akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan citra Kementerian Kelautan dan Perikanan. Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui penataan organisasi, penataan proses bisnis, dan peningkatan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, tak terkecuali di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sebagai salah satu unit kerja Eselon I yang berada di dalamnya, dengan harapan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat umumnya dan pegawai dilingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan sendiri.

Penanganan pengaduan masyarakat merupakan bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif. Pengaduan yang disampaikan oleh masyarakat mencerminkan harapan, kritik, atau laporan ketidaksesuaian yang terjadi dalam pelaksanaan program, kegiatan, maupun pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah.

Sebagai bentuk akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik, setiap pengaduan yang masuk perlu ditangani secara sistematis, cepat, dan tepat. Penanganan pengaduan tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme korektif atas kekeliruan atau penyimpangan, tetapi juga sebagai sarana evaluasi untuk meningkatkan mutu layanan dan kepercayaan Masyarakat.

Namun demikian, dalam upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tidak menutup kemungkinan ada pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan yang melakukan pelanggaran sehingga menghambat proses reformasi birokrasi. Hambatan - hambatan tersebut perlu segera mendapat perhatian dan diidentifikasi. Oleh karena itu, peran serta pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menyampaikan/melaporkan setiap pelanggaran yang diketahuinya sangat diperlukan.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam upaya pencegahan penyimpangan

dan/atau penyalahgunaan kewenangan serta adanya kebijakan Pimpinan Kementerian Kelautan dan Perikanan agar tercipta sistem pengawasan silang di kalangan pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.2 Dasar Hukum

- 1) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- 2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 Tujuan

Laporan ini disusun dalam rangka untuk mengetahui efektivitas penanganan pengaduan serta untuk mengidentifikasi faktor – faktor pendukung ataupun penghambat yang dilakukan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

1.4 Saluran Pengaduan

- 1) Pengaduan disampaikan melalui aplikasi *Whistleblowing System* KKP dengan alamat: whistleblower.kkp.go.id;
- 2) Website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id;
- 3) Pesan singkat elektronik (SMS) dengan format : KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708;
- 4) Pengaduan disampaikan langsung kepada Petugas *Help Desk* di Sekretariat Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan alamat: Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- 5) Pengaduan disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;

- 6) Pengaduan disampaikan secara tertulis melalui surat elektronik ke alamat:
pengaduanprl@kkp.go.id;

BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 Tim Penanganan Pengaduan

Tim Penanganan Pengaduan mempunyai tugas:

- 1) Melakukan koordinasi Penanganan Pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan (TPP) Kementerian dan TPP UPT;
- 2) Memberikan respon awal terhadap penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 3) Memantau tindak lanjut penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 4) Melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian Pengaduan sesuai kewenangannya;
- 5) Mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan Pengaduan;
- 6) Menerima Pengaduan untuk disampaikan kepada Admin UPP Unit Kerja Eselon I;
- 7) Melakukan verifikasi lanjutan atas Pengaduan;
- 8) Melakukan telaah atas Pengaduan yang diterima;
- 9) Menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian Pengaduan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
- 10) Melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan;

2.2 Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan

- 1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan c.q. Tim Kerja Sumberdaya Manusia Aparatur dan Organisasi, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melakukan penyelesaian, pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut laporan pengaduan yang diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
- 2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan c.q. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan melakukan pemantauan dan/atau evaluasi pelaksanaan tindak lanjut penyelesaian laporan pengaduan yang dilakukan oleh Unit Eselon II terkait;
- 3) Suatu pengaduan dinyatakan selesai jika:
 - a. Pengadu mencabut pengaduan;

- b. Pengadu menyatakan puas atas konfirmasi atau jawaban yang diberikan Tim Penanganan Pengaduan kepada Pengadu;
 - c. Pengadu tidak merespon konfirmasi hasil tindak lanjut dari Tim Penanganan Pengaduan dalam 14 (empat belas) hari kalender setelah konfirmasi dilakukan;
- 4) Dalam hal Pengadu meminta penjelasan mengenai perkembangan dan/atau tindak lanjut atas laporan pengaduan yang disampaikan, Pengadu dapat menghubungi Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gedung Mina Bahari III Lantai 11, Jl. Medan Merdeka Timur No. 16 Jakarta 10110;
- 5) Dalam rangka kegiatan pemantauan dan evaluasi serta untuk memberikan jawaban atas pertanyaan pihak Pengadu, Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan sistem pemantauan setiap semesteran atas pelaksanaan penanganan pengaduan.

BAB III PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT

3.1 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

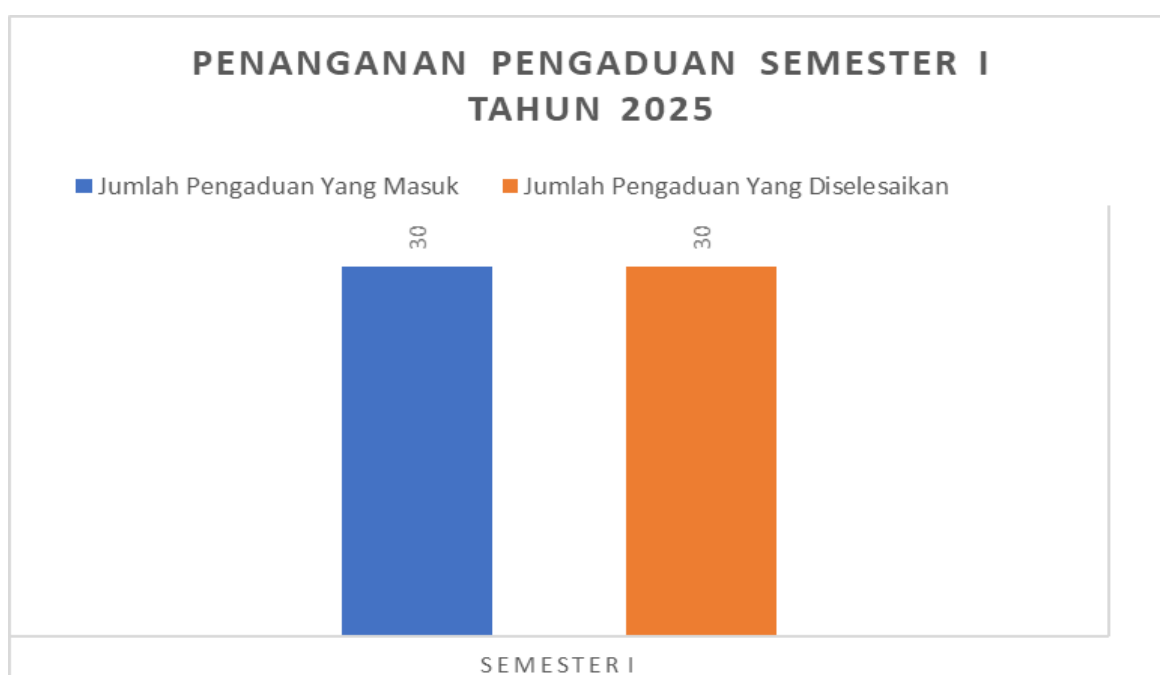
Selama periode Semester I (Januari - Juni) Tahun 2025 Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan menerima pengaduan dan konsultasi permintaan informasi melalui aplikasi LAPOR! dan media sosial *WhatsApp*. Seluruh pengaduan dan konsultasi yang masuk telah diselesaikan dengan berkoordinasi dengan unit kerja terkait.

Pengaduan dan permintaan informasi yang masuk melalui aplikasi LAPOR! Sebanyak 0 (nol) dan laporan yang berasal dari media *WhatsApp* sebanyak 30 (tiga puluh) laporan yang semuanya telah di input dan di integrasikan melalui aplikasi LAPOR! sehingga total pengaduan yang masuk dan di input melalui aplikasi LAPOR! sebanyak 30 (tiga puluh) laporan.

Tabel 1. Rekapitulasi Pengaduan Semester I Tahun 2025

Periode	LAPOR	WhatsApp	Total
Januari – Juni	-	30	30

Grafik 1. Penanganan Pengaduan Semester I Tahun 2025



3.2 Pengaduan Masyarakat yang ditindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan

Pengaduan masyarakat yang disampaikan ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pengaduan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, selain itu juga terdapat beberapa pengaduan masyarakat yang di tindak lanjuti oleh Unit Pelaksana Teknis terkait di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.

BAB IV SARAN DAN TINDAK LANJUT

4.1 Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi

Tidak terdapat saran dan rekomendasi pada periode pelaporan penanganan pengaduan sebelumnya, sehingga tidak ada tindaklanjut dari rekomendasi sebelumnya.

4.2 Saran dan Rekomendasi

Saran/Rekomendasi perbaikan bertujuan untuk menindaklanjuti permasalahan pada penanganan pengaduan lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penerapan penanganan pengaduan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan. Pada Triwulan I Tahun 2025 tidak terdapat saran/rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti pada periode selanjutnya.

V PENUTUP

Laporan penanganan pengaduan ini disusun sebagai bentuk komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan serta keluhan masyarakat. Melalui mekanisme pengaduan yang efektif, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan.

Kami menyadari bahwa penanganan pengaduan masih memiliki ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan sistem pengelolaan pengaduan akan terus dilakukan secara berkelanjutan guna mendukung reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih baik.

LAMPIRAN

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT
PERIODE BULAN JANUARI 2025

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindaklanjutan	Tanggal Tindaklanjutan	Keterangan
							Verifikator	Penelaah			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	#8583031	Whatsapp	24 Jan 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL yang masih menunggu penerbitan tagihan PNB	PT Heng Jaya Mineralindo	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan yang baru dimohonkan akan dilakukan penilaian teknis kembali, jika sudah disetujui oleh pimpinan maka akan diterbitkan tagihan PNB. Pemohon dimohon untuk berkoordinasi dengan PSDKP Pusat sebelum memohonkan kembali di OSS.	Selesai	24 January 2025
2	#8583036	Whatsapp	3 January 2025	Permintaan Informasi	Pemberitahuan penilaian teknis mendadak	PT Riau Andalan Pulp and Paper	Admin Hotline	PIC Dokumen	Admin memohon maaf atas ketidaknyamanannya dan berkenan untuk hadir dalam rapat penilaian teknis tersebut	Selesai	3 January 2025
3	#8583041	Whatsapp	4 January 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL	KUPP Kelas III Sinjai	Admin Hotline	PIC Verifikasi	Permohonan masih berstatus perbaikan persyaratan yaitu perlu melampirkan bukti penggunaan APBN/APBD dibuktikan dengan salinan daftar isian pelaksanaan anggaran	Selesai	4 January 2025
4	#8583081	Whatsapp	6 January 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL setelah melakukan pembayaran PNB	PT Moramo Gamping Makmur	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan sedang proses penerbitan sehingga permohonan dimohon untuk berkenan menunggu	Selesai	6 January 2025
5	#8583091	Whatsapp	8 January 2025	Permintaan Informasi	Belum ada perubahan status permohonan pada e-sea	DKP Provinsi Lampung	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan sedang proses penerbitan sehingga permohonan dimohon untuk berkenan menunggu	Selesai	8 January 2025
6	#8583106	Whatsapp	8 January 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL	Supriadi	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan sedang proses berjangka untuk mendapatkan persetujuan beberapa pimpinan hingga ke Menteri KP, adapun persetujuan memerlukan tanda tangan basah sehingga permohonan dimohon berkenan untuk menunggu.	Selesai	8 January 2025
7	#8583111	Whatsapp	8 January 2025	Permintaan Informasi	Proses PKKPRIL pemohon setelah dilakukan penindakan oleh PSDKP	PT Dok Pantai Lamongan	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan yang telah dikembalikan dan dimohonkan kembali di OSS akan dilakukan penilaian teknis kembali. Pemohon dimohon untuk berkenan menindaklanjuti sebagaimana hasil dari penilaian teknis sebelumnya	Selesai	8 January 2025
8	#8583126	Whatsapp	14 January 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL	Candra	Admin Hotline	PIC Dokumen	Permohonan sedang menunggu persetujuan pimpinan sehingga permohonan dimohon untuk menunggu	Selesai	14 January 2025
9	#8583141	Whatsapp	16 January 2025	Permintaan Informasi	Update permohonan KKPRIL	PT Bhimasena Power Indonesia	Admin Hotline	PIC Verifikasi D	Mengenai jangka waktu verifikasi administrasi kurang lebih memerlukan waktu 21 hari kerja setelah dokumen permohonan KKPRIL dinyatakan lengkap dan sesuai, namun hal tersebut tergantung pada padat tidaknya antrian permohonan yang masuk	Selesai	16 January 2025

PERIODE BULAN FEBRUARI 2025

[illegible]

PERIODE BULAN MARET 2025[illegible]

**FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN APRIL 2025**

[illegible]

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN JUNI 2025

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanlanjut		Tanggal Tindakanlanjut	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
1	#44525231520414	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline Setditjen PK mendapatkan permintaan informasi bagaimana cara mendaftar aplikasi SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi agar pelaku usaha dapat menghubungi hotline pelayanan LPSPSL Sorong untuk pendampingan lebih lanjut	Selesai	23 Juni 2025	
2	#25372523152235	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai permohonan KBLI 03151 untuk jenis hiu				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini terdapat Moratorium SIPJI untuk jenis Hiu/Pari sesuai dengan Surat Edaran No. B.456	Selesai	23 Juni 2025	
3	#25372523153202	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi terkait pembuatan akun SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi agar dapat melakukan pendaftaran akun dengan jalur rekom ke UPT setempat dalam hal ini melalui LPSPSL Serang	Selesai	23 Juni 2025	
4	#25372523153442	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai tata cara perpanjangan SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini untuk perpanjangan SIPJI maka pelaku usaha perlu membuat permohonan baru di OSS	Selesai	23 Juni 2025	
5	#25572523153720	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengusaha yang memiliki NIB dengan alamat di Jakarta sesuai KTP namun tidak memiliki lokasi usaha/gudang di Jakarta namun lokasi usaha/gudang berada di Maluku. Apakah perlu penambahan alamat lokasi usaha/gudang di dalam NIB?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa dalam hal tersebut benar perlu penambahan lokasi usaha/gudang di NTT pada OSS. Untuk lebih lanjut pelaku usaha sudah diarahkan agar menghubungi OSS	Selesai	23 Juni 2025	
6	#44525231538568	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil yang menjadi persyaratan KKPRD				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa berdasarkan PP 28 Tahun 2025 rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil menjadi persyaratan PKKPR Darat. Namun secara sistem belum diimplementasikan untuk usaha baru yang akan memproses perizinannya.	Selesai	23 Juni 2025	
7	#44525231540063	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai proses Rekom garam				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini Rekomendasi Garam sudah tidak dikeluarkan oleh KKP karena semua langsung di neraca komoditas. Admin mengarahkan agar dapat konsultasi kembali ke kementerian terkait.	Selesai	23 Juni 2025	
8	#25372523154102	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai progress permohonan SAJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa terkait verifikasi PNPB SAJI SLA nya adalah 5 hari kerja. Tim akan mengupayakan secepatnya sesuai prosedur yang ada.	Selesai	23 Juni 2025	
9	#25372523154242	Whatsapp	23 Juni 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai bagaimana tata cara perhitungan nilai PNPB Reklamasi				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait hal tersebut dapat dipelajari sesuai pada Permen KP Nomor 14 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perhitungan Nilai Lahan Hasil Reklamasi dan pada lampiran PP Nomor 85 Tahun 2021 di bagian Izin Pelaksanaan Reklamasi	Selesai	23 Juni 2025	

FORMAT REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
PERIODE BULAN MEI 2025

No	ID Tracking	Sumber Pengaduan	Tanggal Diterima	Kategori Pengaduan	Uraian	Data Pengadu	Penanganan		Tindakanjnt		Tanggal Tindakanjnt	Keterangan
							Verifikator	Penelaah	Uraian	Status		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	#28725150814439	LAPOR	15 Mei 2025	Permintaan Informasi	Kasus Penimbunan/Reklamasi di Dusun II Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Pulau Nias. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) telah menerima pengaduan dari perwakilan Warga Desa Miga, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Pulau Nias terkait penimbunan atau reklamasi perairan laut yang dilakukan di pesisir Dusun II Desa Miga, tepatnya di belakang, dengan dugaan pemilik lahannya yaitu Saudara Bp. Ama Yuru Harefa.				Beberapa hal sebagai tindaklanjnt, diantaranya : 1. Telah terjadi reklamasi yang dilakukan oleh Bpk. Ama Yuru Harefa yang dilaporkan oleh KIARA di Dusun II, Desa Miga Kecamatan Gunung Sitoli, Kota Gunung Sitoli yang diduga tidak memiliki izin 2. Kegiatan reklamasi diduga telah mengakibatkan kerusakan yang melanggar beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012, UU Nomor 32 Tahun 2009, dan UU Nomor 27 Tahun 2007 Jo UU Nomor 1 Tahun 2014 3. Kementerian Kelautan dan Perikanan cq Direktorat Jasa Bahari belum pernah menerima permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi untuk wilayah perairan Sumatera Utara selain BUT EMP Gebang di Kab. Langkat 4. Diperoleh informasi dari Ditjen Penataan Ruang Laut bahwa pelaku reklamasi belum pernah mengajukan permohonan PKKPR. Adapun PKKPR terkait kegiatan reklamasi yang berlokasi di wilayah perairan Kota Gunung Sitoli hanya atas nama PT Meridian Aditama Selaras yang saat ini masih dalam tahap verifikasi 5. KKP Cq Direktorat Jasa Bahari telah menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan diperoleh informasi bahwa belum pernah ada permohonan Izin Pelaksanaan Reklamasi di wilayah Kota Gunung Sitoli 6. Tanggal 2 April 2025, Pemerintah Kota Gunung Sitoli telah menerima aduan ini dan telah memutuskan untuk menghentikan reklamasi, namun kegiatan reklamasi masih	Selesai	15 Mei 2025	
2	#25372515131532	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin Hotline Setditjen PK mendapatkan permintaan informasi dimana gudang garam nasional atau gudang garam rakyat ada yang lokasinya di sekitaran jakarta dari KPPN Jakarta VI untuk pembahasan program PUGAR				Admin Hotline Setditjen PK telah memberikan informasi terkait hal tersebut terdapat disekitar daerah karawang	Selesai	15 Mei 2025	
3	#25372515132019	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin Hotline Setditjen PK mendapatkan permintaan informasi perihal pengajuan				Admin Hotline Setditjen PK telah memberikan format dalam pengajuan SIPJI untuk selanjutnya upload di OSS	Selesai	15 Mei 2025	
4	#25372515132309	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin hotline Setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai persyaratan izin pemanfaatan pasir laut				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa dalam persyaratan IPPL pelaku usaha dapat menunjukan kelayakan finansial dalam bentuk rekening bank atas nama perusahaan dan pelaku usaha yang mengajukan IPPL dapat menggunakan pinjaman pihak ketiga untuk memenuhi persyaratan kelayakan finansial.	Selesai	15 Mei 2025	
5	#25372515132449	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengajuan SIPJI yang belum terverifikasi di OSS				Admin Hotline setditjen PK telah memberikan informasi agar pelaku usaha menunggu hingga dokumen terverifikasi di OSS.	Selesai	15 Mei 2025	
6	#25372515132642	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan tindak lanjut terkait permohonan untuk perubahan pada SAJI LN				Admin hotline setditjen PK telah meneruskan pesan ke tim teknis terkait agar ditindak lanjut	Selesai	15 Mei 2025	
7	#02515132850169	Whatsapp	15 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pengajuan SIPJI di OSS yang selalu diarahkan ke amdlnet				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi terkait hal tersebut pelaku usaha perlu menyelesaikan persetujuan lingkungan terlebih dahulu baru dapat mengajukan SIPJI melalui OSS.	Selesai	15 Mei 2025	
8	#45725260927318	Whatsapp	26 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pasir laut yang dapat di ekspor				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa saat ini belum terdapat pembukaan kembali terkait perizinan pemanfaatan pasir laut sehingga belum bisa dilakukan	Selesai	26 Mei 2025	

9	#53225260930399	Whatsapp	26 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai pemanfaatan pasir laut				Admin hotline setditjen PK memberikan informasi bahwa saat ini belum terdapat pembukaan kembali terkait perizinan pemanfaatan pasir laut sehingga belum bisa dilakukan ekspor pasir laut	Selesai	26 Mei 2025	
10	#53225260931475	Whatsapp	26 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi bagaimana cara memiliki SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi mengenai prosedur dan alur untuk memiliki SIPJI	Selesai	26 Mei 2025	
11	#53225260933081	Whatsapp	26 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi bagaimana progress permohonan penambahan gudang pada SIPJI				Admin hotline setditjen PK telah memberikan informasi bahwa saat ini permohonan sedang di proses oleh tim teknis. Mohon agar menunggu.	Selesai	26 Mei 2025	
12	#25372526093648	Whatsapp	26 Mei 2025		Admin hotline setditjen PK mendapatkan permintaan informasi mengenai kuota terkait tulang sirip. Apakah memakai kuota tulang atau memakai kuota sirip?				Admin hotline setditjen PK telah memberikan jawaban terkait hal tersebut agar pelaku usaha bersurat yang ditujukan kepada BPSPL Denpasar dan Dit. KSG yang berisi keluhan untuk mendapatkan pendapat dari pimpinan secara resmi	Selesai	26 Mei 2025	



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520357
LAMAN www.kkp.go.id SUREL ditjenpk@kkp.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT
PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, perlu menetapkan tim penanganan pengaduan unit kerja eselon I dan unit pelaksana teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 390);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2020 tentang Penanganan Pengaduan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1224);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN TENTANG TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN.**

KESATU : Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PK Tahun 2025.

- KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas Pengarah, Penanggungjawab, Pelaksana, dan Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KETIGA : Tim Penanganan Pengaduan Ditjen PK Tahun 2025 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. Pengarah
memberikan arahan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam pelaksanaan penanganan pengaduan
 - b. Penanggung Jawab
bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penanganan pengaduan
 - c. Pelaksana pada Unit Kerja Eselon I
 1. melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Pelaksana Teknis;
 2. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 3. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
 5. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan;
 6. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) pada Unit Kerja Eselon I;
 7. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
 8. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
 9. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I;
 10. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan; dan
 11. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I
 - d. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis
 1. melakukan koordinasi penanganan pengaduan dengan Tim Penanganan Pengaduan Kementerian dan Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I;
 2. memberikan respon awal terhadap penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;

3. memantau tindak lanjut penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
4. melakukan komunikasi, koordinasi, dan pemberian informasi penyelesaian pengaduan sesuai kewenangannya;
5. mengumpulkan bahan dan keterangan yang relevan dengan pengaduan
6. menerima pengaduan untuk disampaikan ke Admin Unit Penyelenggara Pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis;
7. melakukan verifikasi lanjutan atas pengaduan;
8. melakukan telaah atas pengaduan yang diterima;
9. menyampaikan hasil telaah dan pengumpulan bahan dan keterangan dalam bentuk rekomendasi tindak lanjut penyelesaian pengaduan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis;
10. melakukan koordinasi dengan Inspektorat Jenderal terkait hasil pengumpulan bahan dan keterangan melalui Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I; dan
11. membuat laporan penyelesaian pengaduan secara berkala 1 (satu) kali setiap bulan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis.

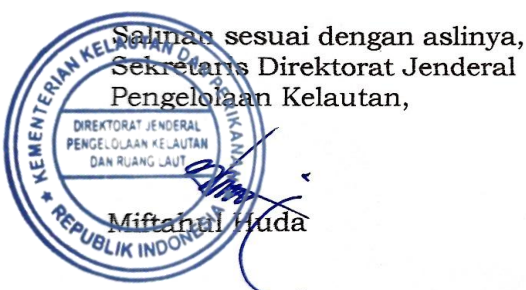
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA Tim Penanganan Pengaduan Unit Kerja Eselon I dan Unit Pelaksana Teknis mengacu pada mekanisme kerja penanganan pengaduan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Masa kerja Tim Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini sampai dengan 31 Desember 2025.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Mei 2025

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A.KOSWARA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG TIM PENANGANAN
PENGADUAN UNIT KERJA ESELON I DAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
KELAUTAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN PENGADUAN UNIT KERJA
ESELON I DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LINGKUP DIREKTORAT
JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN

- A. Pengarah
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
- B. Penanggung Jawab
 - 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan;
 - 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan.
- C. Pelaksana pada Unit Kerja Eselon I

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dedhy Wibowo Setiawan, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Ketua
2.	Irfan Hadi Nursanto, Penata Perizinan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Wakil Ketua/ Admin UPP Eselon I
3.	Leri Nuriadi, Pranata Humas Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Sekretaris
4.	Titus Pramono, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Madya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
5.	Ajar Buditama, Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan	Anggota
6.	Iqbal Suhaemi Gultom, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
7.	Untung, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Sumber Daya Kelautan	Anggota
8.	Hendra Nurcahyo, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Jasa Bahari	Anggota
9.	Rachmad Dian Kuncoro, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda, Direktorat Jasa Bahari	Anggota
10.	Afifah Aghnia Mirrah, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Jasa Bahari	Anggota

11.	Marines Febriani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
13.	Anggia Rivani, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Anggota
14.	Arief Fajar Fitriani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
15.	Raditya Wahyu Prihardianto, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama, Direktorat Konservasi Spesies dan Genetik	Anggota
16.	Fajar Renita Sitinjak, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota
17.	Julham M.S Pelupessy, Ahli Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda, Direktorat Konservasi Ekosistem	Anggota

- D. Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis
1. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Padang

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Fahrur Rozi, Kepala Subbagian Umum	Ketua
2.	Willy Filkosima, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Sekretaris
3.	Anang Kurnianto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
4.	Dannisa Ixora Wanadwiva Handyman, Perencana Ahli Pertama	Anggota
5.	Navila Ulfi Fauziyanti, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
6.	Azzami Rasyid, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

2. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Pontianak

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Husnul Aini, Penata Perizinan Ahli Muda	Ketua
2.	Hanizam, Penata Perizinan Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Prio Sambodo, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris /Admin UPP UPT
4.	Riyan Denestiyanto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
5.	Atikah Maulidyah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
6.	Muhamad Wahyu Al Hadi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

7.	Kaisar Parti Hasudungan, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	Leo Oscar, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
9.	Putri Zilfi Hutari, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Anggota

3. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Makassar

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Andi Jaya, Kepala Subbagian Umum	Ketua
2.	Muhammad Fadly, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Wakil Ketua/Admin UPP UPT
3.	Arrizal Khakim, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Sekretaris
4.	A.Syahrudin, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
5.	Jupri, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
6.	Moh. Yasir, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
7.	Dimas Wahyu Anggara, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	A. Wahyu Oramahi Yusuf At, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

4. Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Denpasar

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dikor Jupantar, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Muda	Ketua
2.	Intan Edhitya Ridzky, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Ina Cahyaningtyas, Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda	Anggota
4.	Kiki Riski Arisandy, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
5.	Dewi Retnoningrum, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
6.	Nurhamdani, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
7.	Muhammad Dikyah Fadillah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	Melati Ayuning Putri, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
9.	Aditya Hidayatullah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
10.	Dewa Gde Tri Bodhi Saputra, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
11.	Mochammad Miftakhul Mashuda, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Admin UPP UPT

5. Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hilmi, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Ketua
2.	Ikrima Avicenna, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris/ Admin UPP UPT
3.	Niramaya Kusuma Wardhani, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
4.	Ilham, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Muda	Anggota
5.	Indri Widhiastuti, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Muda	Anggota
6.	Jamaludin, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
7.	Catur Iswayudi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
8.	Muhammad Alwan Muchlis Reza, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota

6. Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Lukman Faishol, Kepala Urusan Umum	Ketua
2.	Samsul Bahri, Penata Perizinan Ahli Muda	Wakil Ketua
3.	Ronald Raditya Kesatria Sinaga, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama	Sekretaris
4.	Ignatius Tri Hantoro, Analis Barang Milik Negara	Admin UPP UPT
5.	Agus Triono, Pengelola Keuangan	Anggota
6.	Fadhlan Basiluddin Rahmat, Penata Perizinan Ahli Pertama	Anggota
7.	Leonard U. M. Simbolon, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Pertama	Anggota

7. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Serang

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Javier Cezalipi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Ketua
2.	Wiara Marup, Kepala Urusan Umum	Wakil Ketua
3.	Maulana Wachidul Anam, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Wahyu Rianto, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
5.	Yudo Pramono, Analis Kelautan dan Perikanan	Anggota
6.	Achmad Feri Ariansyah, Analis Kelautan Dan Perikanan	Anggota
7.	Agus Sulaksmama, Analis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota

8.	Alyaa Farah Qonitah, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
9.	Nanik Setyaningsih, Analis Konservasi Dan Rehabilitasi Wilayah Pesisir	Anggota
10.	Amalia Alfiana Chairani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Admin UPP UPT

8. Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut Sorong

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Arief Reza, Perencana Ahli Pertama	Ketua
2.	Prehadi, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Wakil Ketua
3.	Moch. Agus Riandyka, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Sekretaris
4.	Inggrid Sara Mandosir, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Anggota
5.	Jhony Elias Raunsai, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan Ahli Pertama	Anggota
6.	Candra Mokodompit, PJLP Tenaga Administrasi Pengelola Website	Anggota
7.	Dheni Kusumarani, Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir Ahli Pertama	Admin UPP UPT

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN,

ttd.

A. KOSWARA

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Direktorat Jenderal
Pengelolaan Kelautan,



Miftahul Huda